

Asmawa Tosepu Minta BPBD Ajarkan Masyarakat Penanganan Bencana

CIBINONG (IM)- Penjabat Bupati Bogor, Asmawa Tosepu meminta personel Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) memperkuat mitigasi bencana alam maupun non alam.

Apalagi, dari segi jumlah personel BPBD tidak sebanding dengan jumlah bencana dan juga luasnya wilayah Kabupaten Bogor.

"Dari 416 desa, hanya 12 desa yang tidak terdampak bencana pada Tahun 2023. Lalu jumlah personel kalau dibagi dengan jumlah desa dan kelurahan tidak seimbang. Hingga kita harus memperkuat mitigasi bencana alam maupun non alam," kata Asmawa Tosepu kepada wartawan, Kamis (18/1).

Asmawa Tosepu pun menghimbau agar masyarakat diajarkan cara penanganan dini bencana alam maupun non alam, agar nantinya meringankan tugas personel BPBD.

"Masyarakat juga harus diajarkan kesiapsiagaan dan keterampilan penanganan dini ben-

cana alam maupun non alam, hal ini kita lakukan karena jumlah personel BPBD terbatas. Yang kita butuhkan ialah supertim dan bukan superman," sambungnya.

Asmawa pun mengajak personel BPBD dan masyarakat berkolaborasi dan bekerjasama dalam penanganan bencana alam maupun non alam.

Ia pun kembali meminta BPBD memperbanyak kecamatan tangguh bencana (Kencana) dan desa tangguh bencana (Destana) serta memanfaatkan teknologi informasi.

"Personel BPBD tetap harus bekerja secara ikhlas dan jangan bekerja secara konvensional lagi, kalian harus bisa memanfaatkan kemajuan teknologi informasi yang sudah masif dan revolusi industri 4.0. Saya minta saudara jangan sampai gagap teknologi atau gagal paham dengan pengetahuan teknologi," tukas Asmawa Tosepu. ● **gio**

BPBD BOGOR SUKSESKAN PEMILU 2024

Siap Amankan Logistik Hingga Petugas TPS dari Ancaman

BOGOR (IM)- Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bogor siap mengamankan kotak suara, surat suara dan petugas Tempat Pemungutan Suara (TPS) dari medan terjal dan perairan.

Ratusan personel Tim Reaksi Cepat (IRC) BPBD Kabupaten Bogor pun beberapa waktu lalu sudah dilatih, baik di Gedung BPBD maupun di Situ Ciri Mekar, Cibinong.

"Prediksi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) ada potensi cuaca ekstrem pada hari pencoblosan pemilihan presiden (Presiden) dan pemilihan legislatif (Pileg), oleh karena itu, kami siap mengamankan kotak suara, surat suara dan petugas TPS dari medan terjal dan perairan," ujar Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor, Muhamad Adam kepada wartawan, Kamis (18/1).

Muhamad Adam mengaku sudah memetakan TPS atau akses TPS yang rawan akan bencana alam, wilayah-

nya tak jauh dari kecamatan yang rawan bencana alam yaitu sebanyak 28 kecamatan.

"Kami sudah memetakan TPS atau akses TPS yang rawan akan bencana alam, kalau resikonya cukup besar, selain personil, kami akan sertakan dengan peralatan search and rescue," tutur Muhamad Adam.

Ia menerangkan jajaran BPBD juga bakal menaungi tugas pembinaan wilayah pada hari pencoblosan Pilpres dan Pileg, lokasinya di Kecamatan Gunung Sindur.

"Selain tugas pengamanan kotak suara, surat suara dan petugas TPS, BPBD juga melaksanakan tugas pembinaan wilayah dari Penjabat Bupati Bogor Asmawa Tosepu pada 14 Februari mendatang," terangnya.

M u h a m a d A d a m menjelaskan bahwa dari beberapa jenis bencana alam, yang berpotensi ialah angin kencang, banjir, tanah longsor, gempa bumi dan pergeseran tanah. ● **gio**



KUOTA TAMBAHAN PUPUK SUBSIDI

Petani menebar pupuk di areal sawah Desa Brondong, Indramayu, Jabar, Kamis (18/1). Kementerian akan memberi tambahan pupuk subsidi sebanyak 7,2 juta ton untuk produksi padi dan jagung pada Januari 2024.

Perbaikan JPO Stasiun Bogor Masih Dibahas Pemkot

BOGOR (IM)- Jembatan penyeberangan orang (JPO) di Jalan Paledang, Kota Bogor yang mengarah ke Stasiun Bogor, kondisinya mengkhawatirkan. Beberapa bagiannya sudah rusak. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bogor, Marshe Hendra Saputra menyebutkan, perbaikan JPO sedang dalam pembahasan Pemerintah Kota Bogor (Pemkot Bogor). "Sedang dalam pembahasan di Pemkot, kami sedang mengajukan peralihan aset dulu, karena asetnya masih di PUPR (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat)," ucap Marshe, Kamis (18/1).

Pemkot Bogor juga masih mencari skema pembiayaan untuk merenovasi JPO Paledang. "Kami sedang menyiapkan beberapa skema pembiayaan. Karna dari APBD belum tersedia anggaran di tahun ini," tutur Marshe.

Dari pantauan di lapangan, salah satu kerusakan tampak pada atap kanopi JPO yang copot. Kondisi ini banyak dikeluhkan pengguna jembatan yang hendak menyeberang.

Seorang pejalan kaki, Buparis (51), mengaku kerap ter-

kena air hujan saat melintas di JPO. "Dari segi kemudahan oke lah. Tapi kalau hujan kan ya basah, ini kena," ucap Buparis, Rabu (17/1).

Gani (65), tukang ojek di sekitar stasiun menuturkan, posisi jembatan terlalu tinggi untuk dilalui. Menurut dia, JPO membuat warga paruh baya dan lansia keletihan.

Gani menilai, tangga JPO juga tidak ramah disabilitas. "Kasihlah kalau orang tua. Yang usia 70 tahun ke atas, orang disabilitas, karena terlalu tinggi," ucap Gani.

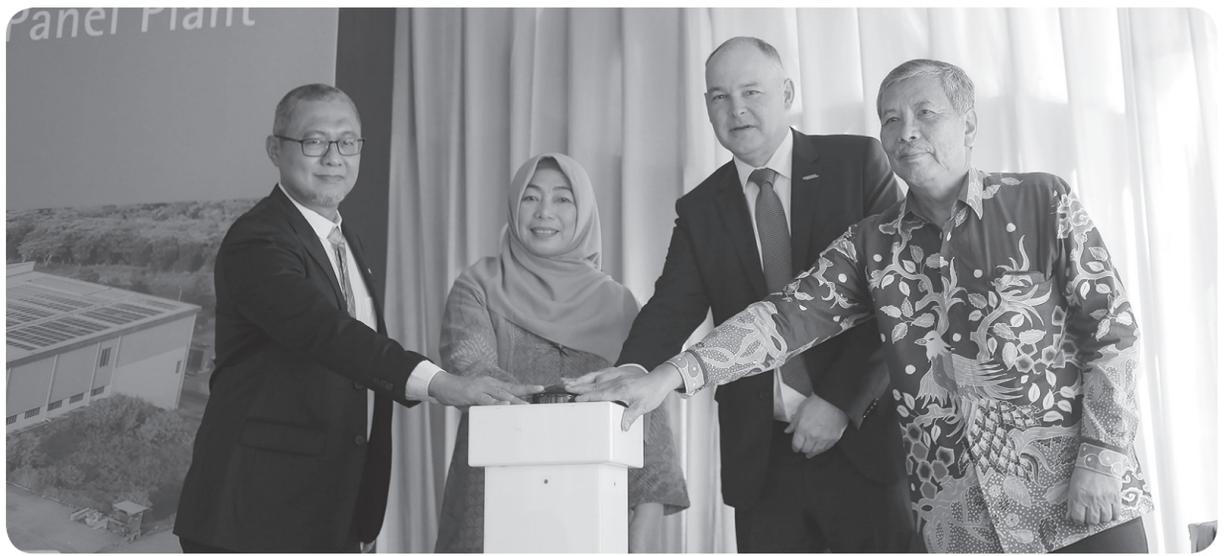
Namun, menurut dia, bagi orang yang usianya tergolong masih muda, tak ada masalah melewati JPO itu.

Tapi orang 40-an ke bawah nyaman-nyaman aja," ungkap Gani.

Kondisi JPO juga tampak kumuh karena dipasang atribut pemilu. Bukan cuma itu, tembok jembatan juga terlihat kusam dan belum dicat.

Sebelumnya, salah satu bagian JPO ditutup lantaran terdapat kerusakan dan dinilai membahayakan. Bagian JPO yang berbentuk besi terlihat sudah keropos. ● **zai**

8 | Nusantara



PERESMIAN PLTS B.BRAUN INDONESIA

Presdir B. Braun Indonesia Rainer Ruppel (kedua kanan), Kadis Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Karawang Rosmalia Dewi (kedua kiri), GM Production Eko Peryatno (kiri), GM Operation & Engineering PT Indotaisei Indah Development FX Hendra (kanan) meresmikan PLTS di Pabrik B. Braun Indonesia, Karawang, Jabar, Kamis (18/1). B. Braun Indonesia berkomitmen mendukung pemerintah menciptakan industri ramah lingkungan melalui pemanfaatan energi terbarukan.

Kantong Parkir Khusus Truk Tambang di Parung Panjang Mulai Beroperasi

Ini merupakan solusi sementara dari persoalan angkutan tambang yang ada di Kabupaten Bogor. Tentu hal ini harus segera direalisasikan karena ini menjadi kebutuhan terutama para pelaku aktivitas pertambangan, kata Pj Bupati Bogor, Asmawa Tosepu.

BOGOR (IM)- Kantong parkir khusus angkutan tambang di wilayah Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor sudah dapat digunakan. Kantong parkir ini sudah bisa digunakan untuk menampung sedikitnya 50 kendaraan truk angkutan tambang.

"Ini merupakan solusi sementara dari persoalan angkutan tambang yang

ada di Kabupaten Bogor. Tentu hal ini harus segera direalisasikan karena ini menjadi kebutuhan terutama para pelaku aktivitas pertambangan. Ini juga dalam rangka memulai meminimalisir kejadian-kejadian yang selama ini terjadi terkait angkutan tambang," kata Pj Bupati Bogor, Asmawa Tosepu dalam keterangannya, Ka-

mis (18/1).

Lanjut Asmawa, untuk tahap awal sudah bisa digunakan atau sekitar 2,2 hektar ini dengan kapasitas mencapai 750 kendaraan truk tambang.

"Hasil peninjauan hari ini, kantong parkir bisa kita pergunakan minimal 50 kendaraan truk tambang sudah bisa memanfaatkan ruang yang sudah tersedia ini. Alhamdulillah progresnya sudah di atas 50 persen. Mudah-mudahan akhir bulan sudah clear semua tapi hari ini berapapun yang bisa kita gunakan sebagai solusi sementara," ungkapnya.

Tahap selanjutnya akan segera mulai melakukan penegakan hukum. Penegakan hukum ini tentu

ditempuh melalui berkoordinasi dengan aparat yang ada di wilayah termasuk stakeholder terkait baik pada tingkat Provinsi Jawa Barat maupun kabupaten tetangga seperti Tangerang dan Banten.

"Penegakan hukum ini menjadi penting karena sumber permasalahan selama ini adalah masalah penegakan hukum. Misalnya izin operasional tambangnya, kemudian kelayakan kendaraan, usia supir yang selama ini kadang-kadang menjadi penyebab termasuk di dalamnya kapasitas atau termasuk muatan kendaraan," tegasnya.

Kata dia, pihaknya akan menegakkan hukum secara bersama-sama terlebih Pemkab Bogor telah memiliki Peraturan Bupati. Setelah

kantong parkir rampung maka penegakan hukum bisa segera dilakukan.

"Kita tegakkan setelah kita siapkan kantong parkir ini, harapannya sebagai solusi sementara tetapi kemudian paralel, solusi permanen bisa kita lakukan terutama pembangunan jalan tambang. Ini komitmen Pemprov Jabar dan Pemkab Bogor," tutupnya.

Untuk diketahui, pembangunan kantong parkir yang direncanakan seluas 4,2 hektar dapat menampung kendaraan lebih dari 1.000 truk tambang. Untuk tahap awal progres pembangunan sudah di atas 50 persen atau 2,2 hektar dengan kapasitas menampung 750 kendaraan sudah hampir rampung diselesaikan. ● **gio**

Stabilkan Harga, Pemkot Bandung Gelar Gerakan Pangan Murah Keliling

BANDUNG (IM)- Pemerintah Kota Bandung menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) keliling menggunakan mobil yang mengangkut berbagai macam kebutuhan pokok masyarakat, di Kelurahan Palasari, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Bandung, Gin Gin mengatakan, kegiatan GPM ini akan terus digelar di 30 kecamatan sebagai upaya menstabilkan harga sekaligus menjaga ketersediaan bahan pokok di Kota Kembang.

"Jadi kami melakukan GPM dengan cara mendatangi langsung masyarakat. Kami menyediakan kendaraan khusus untuk membawa pangan untuk dijual di tempat-tempat yang dianggap rawan atau

rentan pangan," kata Gin Gin di Bandung, Kamis (18/1).

Gin Gin mengatakan, GPM berkeliling ini akan terus dikembangkan dengan berbagai pihak untuk digelar secara masif di berbagai wilayah, demi memastikan pasokan bahan pokok dapat dijangkau khususnya bagi masyarakat yang berada di pinggiran kota.

"Kami akan terus berkoordinasi agar bisa dilakukan di tempat lain sampai masyarakat terbantu dan harga bisa stabil," kata dia.

Dalam program GPM kali ini, berbagai bahan pokok dijual dengan harga murah dan di bawah harga pasar karena telah disubsidi oleh pemerintah sebesar Rp2.000-Rp3.000 untuk setiap komoditas.

"Saat ini harga beberapa pangan masih naik, seperti beras, daging

ayam, cabai dan lainnya. Kami mengantarkan pangan dengan harga murah karena sudah disubsidi Pemerintah," kata dia.

Berbagai komoditas pangan dengan harga lebih murah dijual pada kegiatan GPM kali ini meliputi beras SPHP Rp 53.000 per lima kilogram, dan minyak goreng premium Rp 14.000 per liter. Lalu ayam negeri Rp 39.000 per ekor, cabai rawit Rp 50.000 per kilogram, dan aneka sayuran serba Rp 5.000. Selain menyediakan pangan murah, lanjut Gin Gin juga difasilitasi pemeriksaan rabies pada hewan, pemeriksaan uji bahan pangan, serta memberikan bibit sayuran hingga hewan kepada masyarakat secara gratis.

"DKPP juga membagikan sebanyak 250 bibit tanaman, 500 bibit ayam, dan 250 ikan nila siap konsumsi," kata Gin Gin. ● **pra**



PETANI KELUHKAN HARGA BAWANG MERAH TURUN

Sejumlah petani memanen bawang merah di Kampung Cangkring, Sawahluhur, Serang, Banten, Kamis (18/1). Petani setempat mengeluhkan turunnya harga bawang merah yang biasanya Rp32 ribu kini menjadi Rp26 ribu perkilogram.

Jabar Operasikan Empat Koridor BRT Bandung Raya Tahun Ini

BANDUNG (IM)- Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jawa Barat (Jabar), Iendra Sofyan mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar mulai mengoperasikan empat koridor Bus Rapid Transit (BRT) Bandung Raya pada tahun 2024 ini.

Empat koridor tersebut, kata Iendra, terdiri dari dua koridor yang diambil alih operasionalnya dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub), dan dua lainnya adalah koridor baru. "Empat koridor (dibayai) oleh APBD provinsi. Dua koridor mengambil alih yang sudah dijalankan oleh Kementerian Perhubungan yang dua lagi jalur baru," kata Iendra saat dikonfirmasi di Bandung, Kamis (18/1).

Untuk dua koridor yang diambil alih dari Kemenhub, kata Iendra, adalah koridor barat dan selatan yakni Alun-alun Bandung-Kota Baru Parahyangan via Padalarang dan Stasiun KCJB Padalarang, kemudian koridor BEC-Baleendah.

Pola operasional yang dijalankan oleh Pemprov Jabar, ujar Iendra, adalah meneruskan yang dijalankan oleh Kemenhub yakni buy the service (BTS) atau membayar per kilometer tiap armada yang beroperasi.

Saat dikelola Kemenhub, APBN menyubsidi selisih biaya operasi dan keuntungan kepada operator bus, agar publik bisa mengakses transportasi umum dengan harga lebih terjangkau, dan setelah diambil provinsi pada tahun ini, maka beban pembayaran subsidi ke operator akan beralih menggunakan APBD.

"Yang sekarang berjalan itu sifatnya BTS, Buy The Service, tinggal bayar operator saja. Jadi subsidi untuk menutupi biaya

operator agar tiket lebih murah," kata Iendra pula.

Sedangkan dua koridor penambahan lainnya yang akan dikelola oleh pemprov, kata Iendra, adalah reaktivasi koridor Cibiru-Kebon Kalapa, serta membuka koridor Stasiun KCJB Tegalluar-Stasiun Hall yang akan dieksekusi pada triwulan empat tahun 2024.

Lebih lanjut, Iendra mengatakan untuk dua koridor baru BRT Bandung Raya itu akan menggunakan bus listrik, yang akan diuji coba terlebih dahulu dalam tiga bulan pertama tahun 2024.

"Sedang dihitung kebutuhannya. Untuk bus listrik lagi uji coba. Koridor baru tersebut dilakukan percobaan dulu selama tiga bulan ke depan termasuk inisiatif bus listriknya," kata dia lagi.

Iendra mengatakan, dua koridor baru yang ditambah pada tahun ini juga, akan menggunakan skema BTS dengan melibatkan operator yang nanti dipilih lewat e-Katalog. "Nanti tergantung per kilometer berapa. Operator nanti tinggal kita tinggal pilih di e-Katalog. Itu all in, jadi dia menyiapkan bus, menyiapkan sopir, tinggal nanti sekian, bayar," ujar Iendra.

Lebih lanjut, Iendra mengatakan dalam operasional empat koridor BRT Bandung Raya, Pemprov Jabar tidak memberikan batasan kilometer yang ditempuh oleh tiap armada, dengan harapan bisa mengurangi kemacetan.

"Kami lebih banyak (kilometernya) lebih senang, nantinya tambah lagi anggaran, artinya mudah-mudahan bisa mengurangi macet, tapi kan selama ini masih bertahap, karena keinginan masyarakat untuk naik bus masih belum optimal," ujarnya. ● **pra**